

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

Dr. Edi Setiawan, M.Sc., MSE

Sosialisasi dan Fasilitasi Pedoman Umum/Petunjuk
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan
Kepada Provinsi Jawa Tengah



Amanat Undang-undang 52 tahun 2009

pemerintah memberi wewenang kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melakukan kerjasama pendidikan kependudukan.

TUGAS DAN FUNGSI

DIREKTORAT KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kerjasama pendidikan kependudukan.

sinergi kegiatan antar seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melaksanakan pendidikan kependudukan kepada masyarakat

Upaya peningkatan pengetahuan dilakukan antara lain melalui kegiatan KIE



PERMENDAGRI
NO. 90
TAHUN 2019

Kerjasama

Sinergi

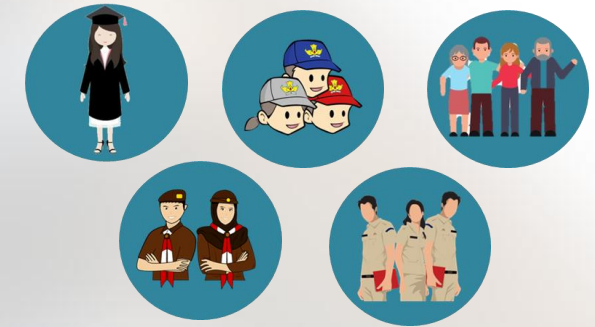
Kolaborasi



Isu dan permasalahan kependudukan harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat

PENDEKATAN EDUKASI KEPENDUDUKAN

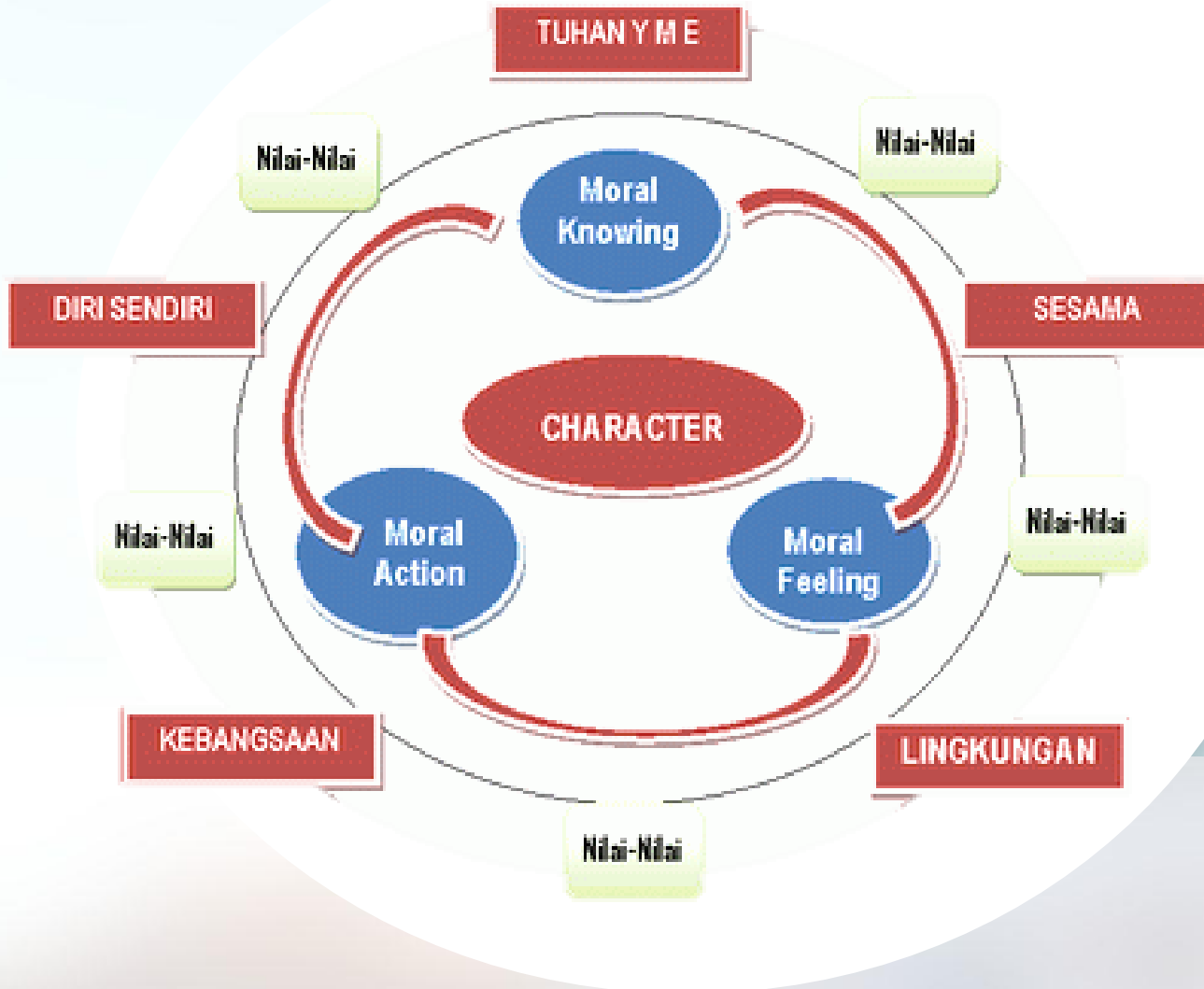
Edukasi pendidikan kependudukan melalui berbagai jalur dan jenjang



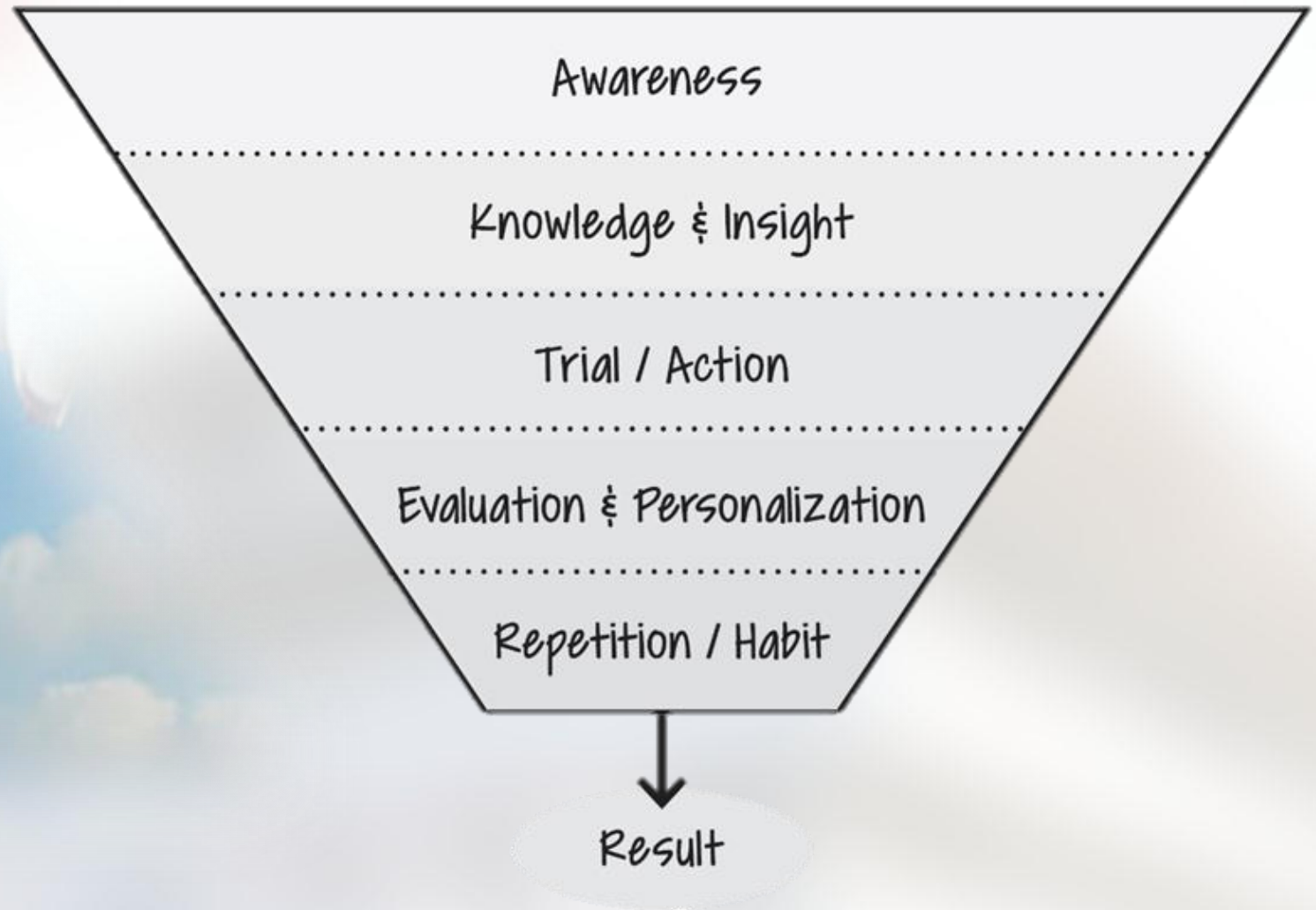
Manfaat Pemahaman Isu Kependudukan

Memiliki sikap dan perilaku yang lebih bertanggung jawab mengelola sumber daya yang ada serta merencanakan kehidupan di masa mendatang dengan lebih baik.

mendorong setiap individu untuk mulai mempersiapkan diri dari sejak dini, dari diri sendiri, dan dari sekarang, serta dari hal yang terkecil dalam menghadapi tantangan di masa mendatang



Pendidikan Kependudukan



HASIL EVALUASI

INDEKS KEPEDULIAN TERHADAP ISU KEPENDUDUKAN

Kuantitas

1. % Menggunakan alat kontrasepsi (CPR)

2. % UKP 20+ PUS 20-29

3. WUS Punya Anak ≤ 2

Kualitas

1. Rata-rata lama sekolah

2. Kepemilikan rekening tabungan penduduk 17+

3. Perceraian

4. Penolong Persalinan (Nakes)

5. Balita punya Akte kelahiran

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Mobilitas

1. Non migran Seumur hidup Penduduk usia 25+

2. Migrasi Keluar Penduduk 25 tahun ke atas

Lingkungan

1. Luas lantai rumah per capita

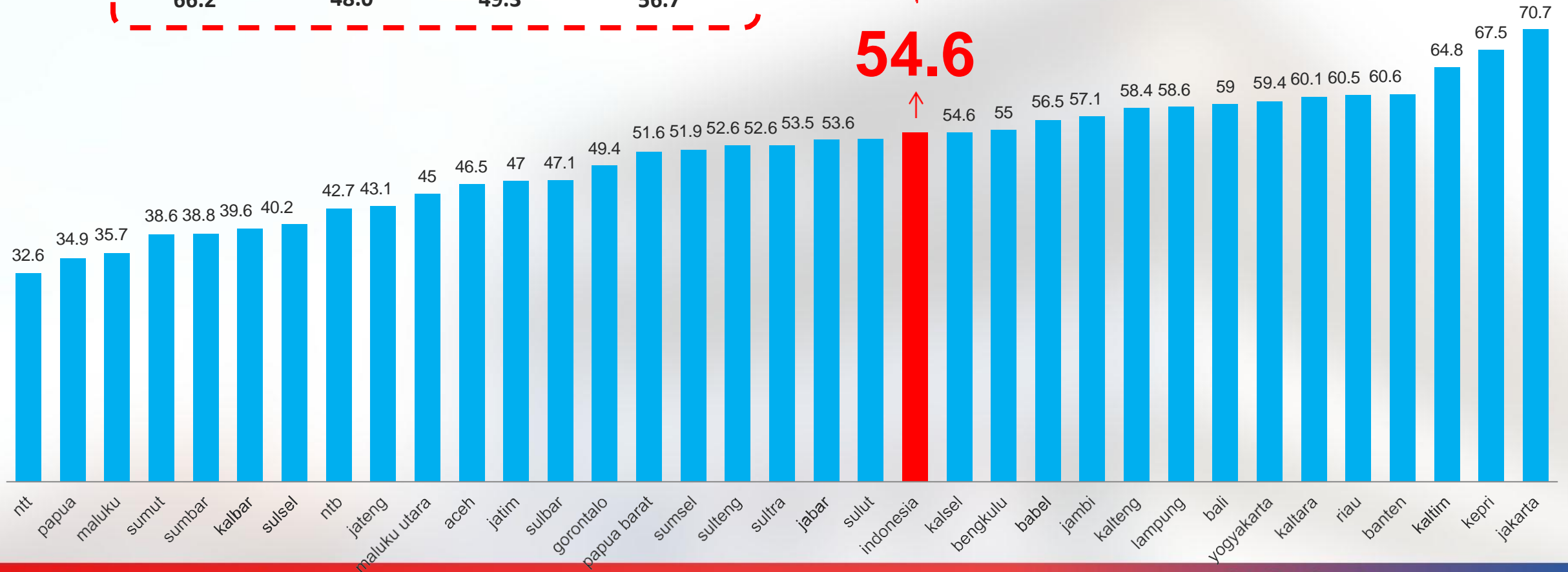
2. Akses Air Bersih

KUANTITAS
66.2

KUALITAS
48.0

MOBILITAS
49.3

LINGKUNGAN
56.7



Provinsi	Komposit				IKIK
	Kuan titas	Kua litas	Mobi litas	Lingku ngan	
11 Aceh	53.4	52.1	35.0	48.1	46.5
12 Sumut	40.1	48.6	21.3	53.5	38.6
13 Sumbar	54.5	48.9	16.2	52.2	38.8
14 Riau	60.1	49.5	91.1	49.6	60.5
15 Jambi	56.9	50.5	76.3	48.6	57.1
16 Sumsel	64.1	46.9	51.2	47.0	51.9
17 Bengkulu	58.3	52.8	71.7	41.4	55.0
18 Lampung	67.9	48.3	64.7	55.4	58.6
19 Babel	54.9	49.9	60.4	61.4	56.5
21 Kepri	71.3	56.4	83.9	61.6	67.5
31 DKI Jakarta	82.7	69.8	79.2	54.8	70.7
32 Jabar	65.6	39.5	56.6	55.7	53.5
33 Jateng	76.5	39.5	16.7	68.5	43.1
34 DIY	89.2	61.9	31.8	70.7	59.4
35 Jatim	80.0	41.8	22.3	65.5	47.0
36 Banten	68.1	44.0	81.3	55.2	60.6
51 Bali	68.2	68.3	50.8	51.3	59.0
Indonesia	66.2	48.0	49.3	56.7	54.6

Provinsi	Komposit				IKIK
	Kuan titas	Kua litas	Mobi litas	Lingku ngan	
52 NTB	60.2	46.1	27.4	43.9	42.7
53 NTT	34.5	40.4	30.5	26.5	32.6
61 Kalbar	53.6	46.4	43.7	22.7	39.6
62 Kalteng	56.7	50.7	82.5	48.9	58.4
63 Kalsel	59.5	49.0	55.6	54.8	54.6
64 Kaltim	57.4	53.6	92.8	62.0	64.8
65 Kaltara	43.3	58.7	91.6	55.9	60.1
71 Sulut	62.2	51.2	44.6	58.3	53.6
72 Sulteng	47.7	50.2	70.5	45.2	52.6
73 Sulsel	43.8	48.5	21.1	58.6	40.2
74 Sultra	44.0	52.3	66.4	50.0	52.6
75 Gorontalo	63.0	46.4	37.1	54.9	49.4
76 Sulbar	35.1	54.7	61.0	42.1	47.1
81 Maluku	26.6	38.5	40.7	39.1	35.7
82 Maluku Utara	38.1	43.4	54.9	45.0	45.0
91 Papua Barat	38.7	48.4	91.1	41.6	51.6
94 Papua	38.0	32.2	76.2	15.9	34.9
Indonesia	66.2	48.0	49.3	56.7	54.6

INDEKS KEPEDULIAN TERHADAP ISU KEPENDUDUKAN TAHUN 2020

NASIONAL

48,0

66,2

56,7

49,3

JAWA TENGAH

56,5

76,5

68,5

16,7

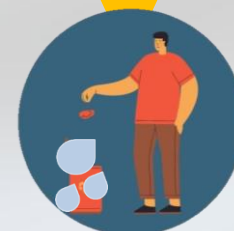
KUALITAS



KUANTITAS



LINGKUNGAN



MOBILITAS



Sumber : Puslitbang KB dan KS,
BKKBN, 2020

PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG ISTILAH KEPENDUDUKAN

Sebanyak
67.224
responden
keluarga
ditanya



Apakah pernah mendengar/melihat/
membaca tentang istilah
kependudukan?

90.6 % Pengangguran

92.6 % Ketenagakerjaan

36.5 % Kelahiran /
Fertilitas

37.6 % Kematian
mortalitas

36.3 % Kesakitan /
morbidity

44 %

Ledakan
Penduduk

74.4 %

Migrasi

72.3 %

Transmigrasi

55.1 %

Urbanisasi

2.7 %

Tidak ada
jawaban

57.9%

Krisis moral /
sosial

92.9 %

Kemiskinan

60.6 %

Krisis energi

82.9 %

Kerusakan
lingkungan

Sumber : SKAP 2019, BKKBN

PENGETAHUAN REMAJA TENTANG ISTILAH KEPENDUDUKAN



Ledakan penduduk

60.6 %

Migrasi

82.6 %

Transmigrasi

80.0 %

Urbanisasi

68.8 %

Pengangguran

83.0 %

Ketenagakerjaan

85.1 %

Krisis moral / sosial

57.0 %

Kemiskinan

87.1 %

Krisis energi

58.1 %

Kerusakan lingkungan

79.5 %

Tidak Pernah Satupun

2.6 %



Apakah pernah mendengar/melihat/
membaca tentang istilah
kependudukan?

Kelahiran / Fertilitas

81.1 %

Kematian mortalitas

81.6 %

Kesakitan / morbiditas

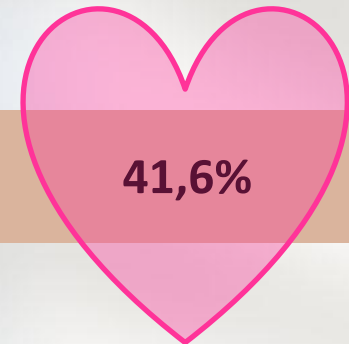
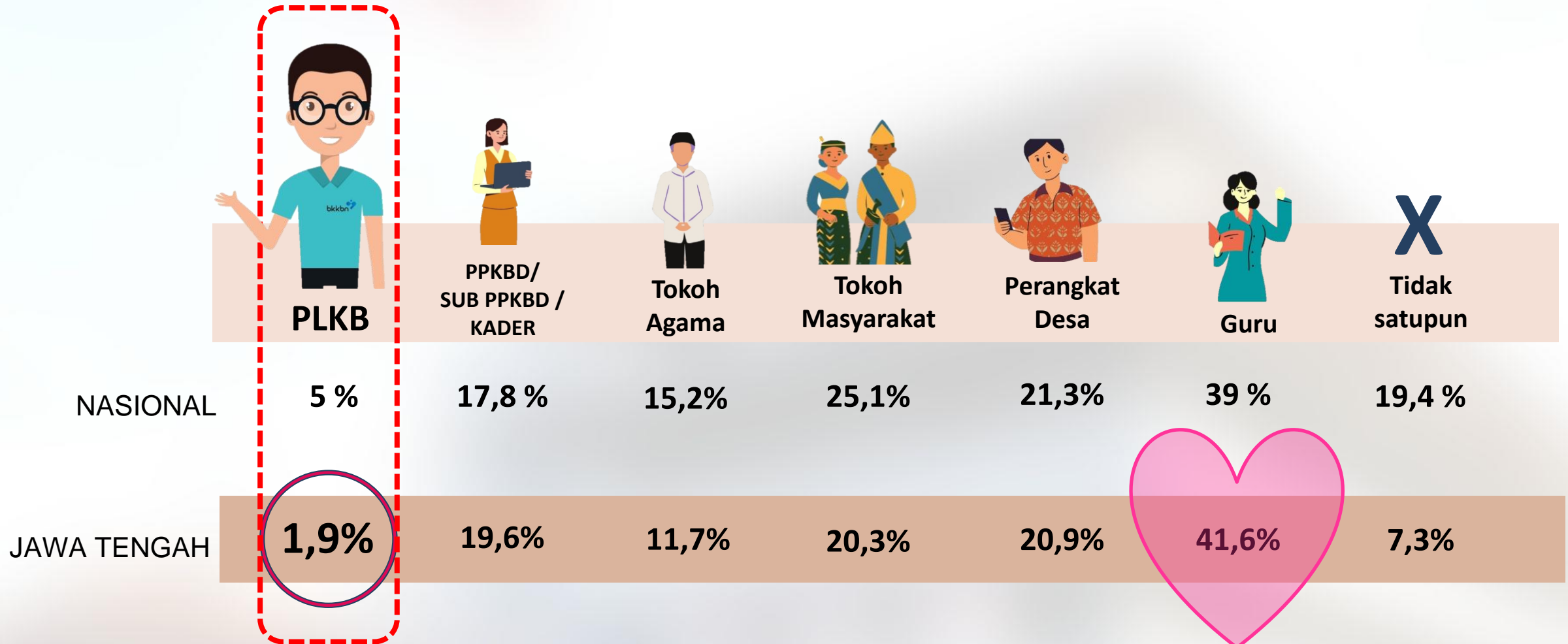
76.8

Sumber : SKAP 2019, BKKBN



Sebanyak
23.821
responden
remaja
ditanya

SUMBER INFORMASI ISTILAH KEPENDUDUKAN DARI PETUGAS



Rendahnya pemahaman masyarakat terkait isu kependudukan

Pengembangan materi berbasis teknologi masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kuantitas dan kualitas

- Diperlukan beberapa upaya penguatan jalur formal sehingga mencapai kategoriparipurna.
- Diperlukan pengembangan sistem yang implementatif di lapangan untuk jalur non formal dan informal



Pengembangan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja tingkat pusat dan daerah masih terkendala :

- Kemandirian stakeholder dan mitra kerja masih relatif rendah
- Masih sangat tergantung dari fasilitasi yang dilakukan oleh pusat dan kaper
- Pemahaman terkait kebijakan, strategi, dan mekanisme operasional pelaksanaan pendidikan kependudukan di lapangan masih rendah

Perbanyak dan distribusi materi oleh OPD di tingkat provinsi dan kab/kota masih belum optimal

KEBIJAKAN DAN STRATEGI



KEBIJAKAN

PENGUATAN PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN



Penguatan dan perluasan kerjasama pendidikan kependudukan



Dukungan materi pendidikan kependudukan tiga jalur



Pembinaan pelaksanaan pendidikan kependudukan

FORMAL

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)

Internalisasi melalui Integrasi Mata Pelajaran, Kegiatan Kesiswaan dan Pojok Kependudukan

Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK)

- Kegiatan kemahasiswaan : KKN tematik kependudukan, Magang, keg seni dan olahraga
- Kegiatan perkuliahan : Kuliah umum kependudukan, MKWU
- Kegiatan penelitian : Lomba karya ilmiah, skripsi/thesis kependudukan, pusat studi kependudukan
- Pojok Kependudukan

INFORMAL

Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass-PK)

Sosialisasi / edukasi kependudukan untuk masyarakat melalui keg poktan, kelompok/komunitas masyarakat termasuk kegiatan online

NON FORMAL

Pramuka Saka Kencana

Materi pendidikan kependudukan melalui kegiatan kepramukaan

ASN Peduli Kependudukan

Materi pendidikan kependudukan melalui diklat ASN



Koordinasi

Rapat koordinasi antar OPD, serta melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan lembaga terkait (Perwakilan BKKBN, Dinas/Badan KKB, Dinas Pendidikan, Kanwil Agama) sesuai dengan peran dan kewenangannya

Untuk pengelola dan pelaksana SSK; Orientasi/Diklat guru-guru tentang kependudukan dan penyusunan RPP; kemudian Penyusunan rencana kerja implementasi SSK di sekolah.



Sosialisasi dan Orientasi

Penyiapan SK/MoU



Oleh pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota atau Kepala OPD/Dinas terkait atau Kepala Perwakilan BKKBN)



Penyediaan materi, Penyiapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta kegiatan kesiswaan/ ekstrakurikuler dengan konten kependudukan

Materi, RPP, LKS dan Kegiatan Kesiswaan

Pembentukan Pojok Kependudukan



Uji Coba Pelaksanaan



Pencanangan SSK



Implementasi SSK



Tahap pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan







Data Capaian Cakupan Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan Di Tiga Jalur Pendidikan

Keterangan:

	BELUM MENGISI
	BARU MENGISI 1-2 JALUR
	TELAH MENGISI 3 JALUR
	TELAH MENGISI 3 JALUR LENGKAP
	MASIH BERGABUNG DENGAN KALTIM

NO	PROVINSI	JUMLAH INSTITUSI YANG TELAH DIINPUT						
		FORMAL				NONFORMAL		INFORMAL
		SD	SMP	SMA	PT	ASN	PRAMUKA	MASS
1	Aceh		3	33	4		1	11
2	Sumatera Utara	1	14	27	4	1		1
3	Sumatera Barat		2	2	3		1	1
4	Riau		3	3				
5	Jambi		2	5	3			1
6	Sumatera Selatan		7	17	4	1		2
7	Bengkulu			7	5			
8	Lampung		7	10	7	1	4	6
9	Kepulauan Bangka Belitung		2	7				
10	Kepulauan Riau	1	6	7	1		1	1
11	DKI Jakarta	1	11	11	5	1	1	6
12	Jawa Barat	1	38	42	1		16	2
13	Jawa Tengah		5	17	6		5	1
14	D.I. Yogyakarta		21	5	2	1		13
15	Jawa Timur		4	22	24	4		2
16	Banten		6	3				
17	Bali			2				
18	NTB		1	4	1		1	
19	NTT			5				
20	Kalimantan Barat			1				
21	Kalimantan Tengah		2	2	1			1
22	Kalimantan Selatan		17	10	2	1		4
23	Kalimantan Timur	20	46	20			2	9
24	Kalimantan Utara			1				
25	Sulawesi Utara	1	3	3				1
26	Sulawesi Tengah			2			1	
27	Sulawesi Selatan		3	6	1			
28	Sulawesi Tenggara			1				1
29	Gorontalo		3	1	1		1	2
30	Sulawesi Barat		1	2	1	1		1
31	Maluku		3	12	1			
32	Maluku Utara		1	2			1	1
33	Papua			2	5			
34	Papua Barat	4	2	2	2			
		29	213	296	84	11	35	67

Jumlah SSK Dasar dan Paripurna

Level	Dasar	Paripurna
SMP	26	21
SMA	68	29

PERAN DAERAH/OPD KB DAN DINAS

Dalam upaya kerjasama pendidikan kependudukan

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN **JALUR FORMAL**

SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN



- Penyusunan kebijakan Panduan Teknis
- Penerapan Model Nasional SSK dan Pojok Kependudukan di jenjang SD, SMP, & SMA Sederajat
- Sosialisasi dan Fasilitasi
- Montioring dan Evaluasi



- Menerapkan Model Provinsi SSK dan Pojok Kependudukan di jenjang SD, SMP, & SMA Sederajat
- Sosialisasi dan Fasilitasi



Menerapkan SSK dan Pojok Kependudukan pada jenjang SMA Sederajat



- Menerapkan Pendidikan kependudukan melalui kegiatan GLS (gerakan nasional literasi sekolah) pada jenjang SD Sederajat
- Melakukan SSK dan Pojok Kependudukan pada jenjang SMP Sederajat

**BKKBN
Pusat**

**Per.
BKKBN
Provinsi**

**OPD KB
Provinsi**

**OPD KB
Kab/Kota**

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN **JALUR FORMAL**

PTPK



- Penyusunan kebijakan Panduan Teknis
- Menerapkan Model Nasional PT Peduli Kependudukan dan Pojok Kependudukan
- Sosialisasi dan Fasilitasi
- Montioring dan Evaluasi



- Menerapkan PT Peduli Kependudukan dan Pojok Kependudukan pada jenjang perguruan tinggi (KKN, PKL, MKWU/MKDU, PSKK, Kegiatan lainnya yang relevan)



Menyesuaikan dengan PT milik Pemda (kedinasan)

**BKKBN
Pusat**

**Per.
BKKBN
Provinsi**

**OPD KB
Provinsi**

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR NON FORMAL



Balai diklat



- Penyusunan kebijakan Teknis
- Menerapkan pendidikan kependudukan pada Diklat ASN di Institusi Pusat/ Nasional
- Sosialisasi dan Fasilitasi
- Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan mitra Lembaga Diklat Pusat/Nasional
- Pengembangan dan penyusunan materi
- Monitoring dan Evaluasi



- Melaksanakan pendidikan kependudukan pada Diklat ASN di Institusi BKKBN Provinsi serta Pemda Provinsi dan Kab/Kota
- Sosialisasi dan orientasi materi
- Pengembangan Materi



- Melaksanakan pendidikan kependudukan pada Diklat ASN di Pemda Provinsi dan Kab/Kota
- Sosialisasi dan Implementasi
- Pengembangan Materi



- Melaksanakan pendidikan kependudukan pada Diklat ASN di Pemda Provinsi dan Kab/Kota
- Sosialisasi dan Implementasi
- Pengembangan Materi

**BKKBN
Pusat**

**Per.
BKKBN
Provinsi**

**OPD KB
Provinsi**

**OPD KB
Kab/Kota**

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR NON FORMAL



Pramuka



- Penyusunan kebijakan Teknis
- Menerapkan pendidikan kependudukan pada Kepramukaan
- Sosialisasi dan Fasilitasi
- Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kwartir Nasional
- Pengembangan dan penyusunan materi
- koordinasi dengan komponen terkait di BKKBN penanggung-jawab krida KKBPK
- Monitoring dan Evaluasi



- Menerapkan pendidikan kependudukan pada Kepramukaan
- Sosialisasi dan Fasilitasi
- Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kwartir Daerah
- Pengembangan dan penyusunan materi
- Monitoring dan Evaluasi



- Melaksanakan pendidikan kependudukan pada kepramukaan
- Sosialisasi dan Implementasi
- Pengembangan Materi



- Melaksanakan pendidikan kependudukan pada kepramukaan
- Sosialisasi dan Implementasi
- Pengembangan Materi

**BKKBN
Pusat**

**Per.
BKKBN
Provinsi**

**OPD KB
Provinsi**

**OPD KB
Kab/Kota**

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN **JALUR INFORMAL**



- Penyusunan kebijakan Panduan Pengelolaan
- Menerapkan Penduk Model Nasional pada Poktan
- Sosialisasi dan Fasilitasi



- Menerapkan pendidikan kependudukan Model Provinsi pada Poktan
- Sosialisasi dan Fasilitasi



- OPD KKB Provinsi menerapkan Penduk di Provinsi & Kab/Kota pada Poktan – poktan (Poktan Bangga Kencana, Poktan Tani, Karang Taruna, dan Poktan lainnya).



- OPD KKB Kab/Kota menerapkan Penduk pada Poktan-poktan tingkat lapangan (Poktan Bangga Kencana, Poktan Tani, Karang Taruna, dan Poktan lainnya).

**BKKBN
Pusat**

**Per.
BKKBN
Provinsi**

**OPD KB
Provinsi**

**OPD KB
Kab/Kota**



RENCANA KERJA TAHUN 2021

Pengembangan Materi Pendidikan
Kependudukan



Monitoring dan Evaluasi

Pendidikan Kependudukan
(Formal, Nonformal dan
Informal). Saat ini dalam
pengembangan aplikasi e- monev



Pengembangan juklak (Formal, NF
dan IF) dan Sosialisasi kebijakan
penduk



RENCANA KERJA DITPENDUK

Pembinaan di bidang
Kerjasama Pendidikan
Kependudukan



Pengembangan Teknologi
Materi Pendidikan
Kependudukan (F, NF & IF)



Implementasi Pendidikan
Kependudukan dalam bentuk orientasi
dan publikasi (lomba edukasi penduk
dan SSK paripurna)



Pengembangan dukungan kemitraan
pendidikan kependudukan (penyusunan
teknis pengembangan program penduk)





RENCANA KEGIATAN JALUR FORMAL

1. Penyusunan Materi (LKS Bahasa Indonesia)
2. Pengembangan Teknologi Pembelajaran (e-LKS dan berbasis android)
3. Kerjasama Ikatan Guru Indonesia (IGI)
4. Kurikulum dan RP untuk orientasi kependudukan guru SSK
5. Kegiatan publikasi Pendidikan kependudukan (lomba SSK Paripurna)
6. Orientasi Kependudukan untuk Guru SSK (VM)

RENCANA KEGIATAN JALUR NON FORMAL



1. Pembuatan materi terkait stunting untuk pramuka penegak
2. Pembuatan Videografis
4. Kegiatan publikasi Pendidikan kependudukan (lomba kependudukan, sosial media, dll)
5. Pembuatan Petunjuk Teknis Jalur Pendidikan Nonformal
6. Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Kependudukan Jalur Nonformal





RENCANA KEGIATAN JALUR INFORMAL

1. Penyusunan buku bacaan digital untuk anak-anak
2. Penyusunan buku bacaan untuk milenial dan masyarakat umum
3. Penyusunan leaflet dan lembar balik
4. Kegiatan publikasi Pendidikan kependudukan (sosial media, lomba konten edukasi kependudukan)
5. Webinar edukasi kependudukan bekerjasama dengan mitra kerja



PUBLIKASI MATERI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

MATERI BERDASARKAN JALUR

FORMAL



Buku bacaan siswa SD, SLTP –
SLTA, Mahasiswa PT



Buku Ajar Integrasi dalam
Mapel-Makul



Modul Guru - Dosen

NON FORMAL



Buku bacaan peserta Diklat,
Pramuka



Modul / bahan ajar WI /
trainer

INFORMAL



Materi /modul bagi Toga, Toma,
Penyuluh, Kader, dsb



Materi bacaan, infografis bagi
Masyarakat baik cetak maupun
digital *socmed

SHARE

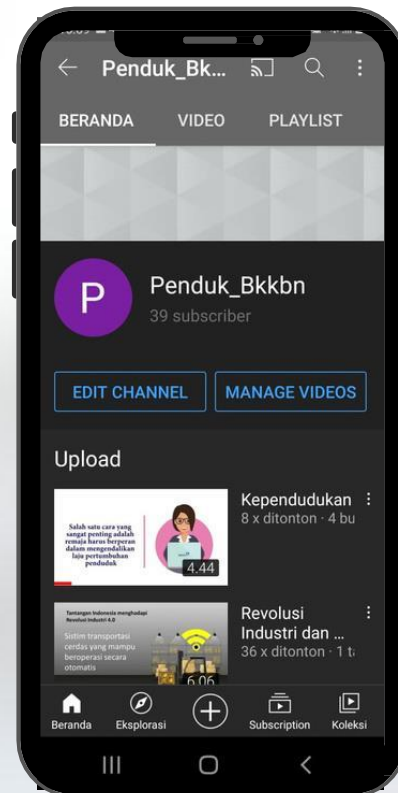
SUBSCRIBE



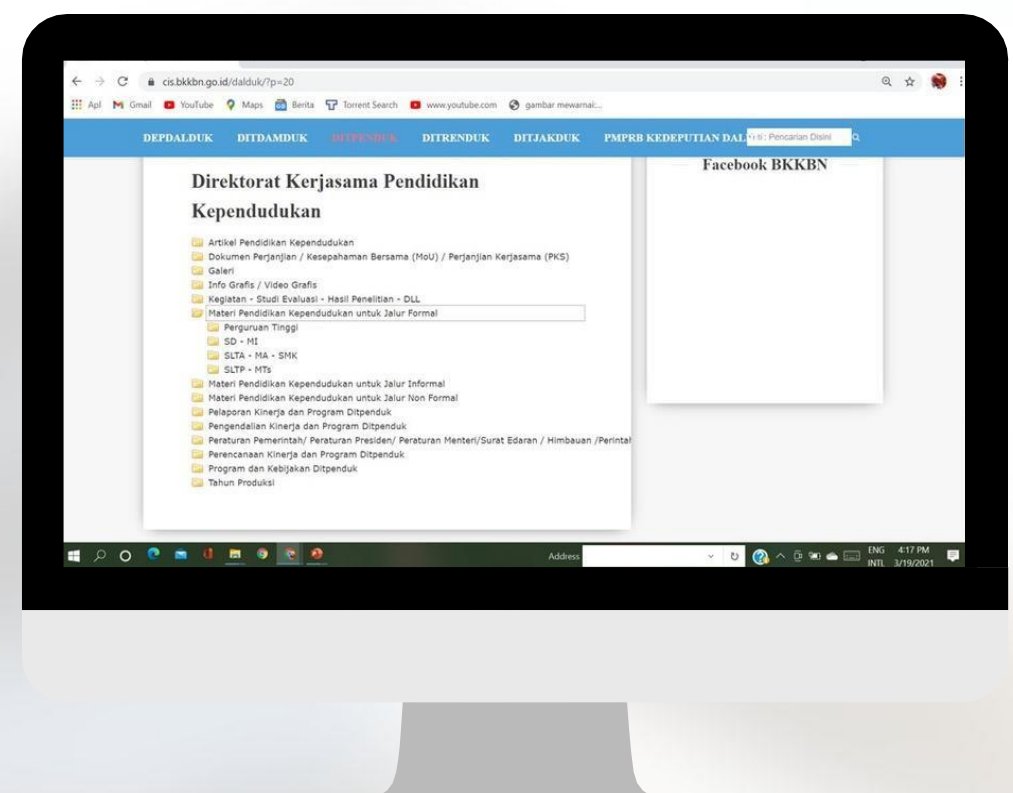
penduk_bkkbn



Penduk Bkkbn



Penduk_Bkkbn



<https://cis.bkkbn.go.id/dalduku/?p=20>

Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan

- Artikel Pendidikan Kependudukan
- Dokumen Perjanjian / Kesepahaman Bersama (MoU) / Perjanjian Kerjasama (PKS)
- Galeri
- Info Grafis / Video Grafis
- Kegiatan - Studi Evaluasi - Hasil Penelitian - DLL
- Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal
- Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Informal
- Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Non Formal
- Pelaporan Kinerja dan Program Ditpenduk
- Pengendalian Kinerja dan Program Ditpenduk
- Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden/ Peraturan Menteri/Surat Edaran / Himbauan /Perintah
- Perencanaan Kinerja dan Program Ditpenduk
- Program dan Kebijakan Ditpenduk
- Tahun Produksi

**Materi
Penduk
dapat
diunduh**

GRATIS



<https://cis.bkkbn.go.id/dalduk/?p=20>

THINK BIG AND ACT NOW

